

Poskolonialitas Islam Nusantara



Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya

Dari aspek poskolonial, Islam Nusantara adalah cara menghadirkan Islam dalam gambaran lebih toleran, kultural, beragam, dan etnografis. Ini berbeda dengan semangat Islam rezimis yang muncul pada akhir Orde Baru.

Oleh **TEUKU KEMAL FASYA**

AGAKterkejut penulis ketika melihat cuplikan video di sebuah grup whatsapp yang berisi ceramah seorang guru besar dan mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Aceh yang memberikan gambaran stigmatis dan tricky tentang Islam Nusantara. Dalam satu bagian ceramahnya ia mengatakan pengikut Islam Nusantara tidak akan mendapatkan surga.

Tentu ceramah itu adalah kesimpulan prematur dan ceroboh. Pertama, gagasannya mengandung “kesesatan logis” – memakai istilah Imam Al-Ghazali : tahafuth falasifah – yang menyamakan konsepsi Islam Nusantara sebagai konsep eskatologis dalam logika teologi-skolastik. Padahal, konsep Islam Nusantara adalah basis pemikiran yang menghimpun sejumlah dinamika sejarah dan kebudayaan masyarakat di Indonesia, bukan tawaran konsepsi teologi-statis perse.

Nahdlatul Ulama sendiri menjadikan Islam Nusantara sebagai tema utama dalam Mukhtamar ke-33 pada 1-5 Agustus 2015 lalu menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah tafsir istingtif Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Nusantara yang telah berumur ratusan tahun (Moqsith, 2016). Jadi ia bukan sebuah fabrikasi “rumusan teologis” yang baru diolah dan siap saji.

Kedua, konsepsi Islam Nusantara ini menjadi cara pandang yang diakronis atas peradaban Islam yang tumbuh di Nusantara. Menolak konsepsi Islam Nusantara sama dengan setuju pada ahistorisisme Islam – khas pemikiran wahabi – yang menolak dialektika Islam dalam sejarah non-Arab.

Sisi antropologis

Bagi penulis sendiri, Islam Nusantara juga bisa didekati dari aspek antropologi-etnografis, yang memperlihatkan diorama Islam di wilayah kepulauan di Asia Tenggara ini dengan kultur besar Melayu. Realitas antropologis Islam ini salah satunya diklasifikasi oleh Geertz (1976) dengan taksonomi sosial santri, priyayi, dan abangan.

Melihat Islam Nusantara harus terhindar dari cara pandang *reductio ad absurdum*, sehingga tidak terjerembab pada kesesatan konseptual. Dari kacamata etnografis, sejarah Islam di Nusantara ini adalah proses yang berjalan dalam dialektika positif dengan semangat untuk memantapkan sejarah masyarakat, melalui tradisi lisan, pepatah, sastra lokal, kitab-kitab Islam lokal, dan pengetahuan ekologis.

Sejarah Islam Nusantara

Secara genealogis, penulis melihat konsep Islam Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah pengislaman Kerajaan Hindu pertama di Nusantara: Samudera Pasai (1267-1521). Sejarah islamisasi Samudera Pasai sendiri sejak awal dilakukan dengan jalur perdagangan, kemudian diikuti dengan adaptasi sosial, agama, dan kebudayaan. Pola migrasinya pun tidak langsung berasal dari Timur Tengah, tapi menyebar dari pantai Coromandel dan Malabar (Azra, 2004 : 5-6). Artinya masih ada tambang “Hindu” yang tidak terganggu oleh konflik. Modal ini berperan transformatif, yang dimulai dari Aceh kemudian menyebar ke seluruh Nusantara dengan perjumpaan yang saling menghargai dan memajukan.

Proses dialektika itu akhirnya memberikan situasi sejarah yang produktif . Perang dan aneksasi bukan jalan yang dilakukan dalam perluasan Islam. Hilirisasi itu kemudian berkembang melalui sosok yang sangat menonjol pada abad 17, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili (1615-1693).

Abdurrauf kemudian menjadi Hakim Agung (Qadhi Malik Al-‘Adil) di pemerintahan empat Sultanah di Aceh. Ia ulama besar pertama Nusantara dengan pengalaman pendidikan 19 tahun di Mekkah dan Madinah. Ia menguasai dengan sangat baik ilmu-ilmu esoteris (tafsir, hadist, fiqh, dll) dan ilmu esoteris (tasawuf dan ilmu

Tanggal: 15 September 2021

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#),